

**ANALISIS MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMPN 4 MOJOSONGO
BOYOLALI**

Ikang Maulana Mas'ud, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407
Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Sistem pendidikan inklusif membuka dengan sangat lebar untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar bisa bersekolah dan satu kelas dengan anak-anak lainnya dalam satu sekolah. Semangat tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memastikan anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang serupa dengan siswa lainnya. Penelitian ini hendak memfokuskan pengamatan pada manajemen pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali menggunakan proses manajemen menurut Mee yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan dari guru atau tenaga pendidik di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya berjalan dengan baik, berupa kurikulum dan bahan ajar yang masih disamakan dengan siswa lain, tidak adanya sarana dan prasarana khusus siswa inklusif, serta tidak adanya guru pembimbing khusus.

Kata Kunci: Analisis, Manajemen, Pendidikan Inklusif

***THE ANALYSIS OF MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AT SMPN 4
MOJOSONGO BOYOLALI***

Ikang Maulana Mas'ud, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407
Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The inclusive education system is very wide open for children with special needs to be able to attend school and be in the same class with other children in the same school. This spirit is contained in The Act Number 20 of 2003 concerning the National Education System which ensures that children with special needs have access to education similar to other students. This study aims to analyze the management of inclusive education at SMPN 4 Mojosoongo Boyolali using the management process according to Mee, namely planning, organizing, actuating, and controlling. The method used in this study is a descriptive qualitative method using informants from teachers or educators at SMPN 4 Mojosoongo Boyolali. The results obtained indicate that the implementation of inclusive education has not yet been fully implemented, in the form of curriculum and teaching materials that are still equated with other students, the absence of special facilities and infrastructure for inclusive students, and the absence of a special supervisor teacher.

Keywords: *Analysis, Management, Inclusive Education*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang paling mendasar. Hal ini memiliki makna lain bahwa setiap warga negara berhak dan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan perlu diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Hal ini tercermin dalam pasal 15 yang mengamanatkan bahwa: “Pendidikan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial atau yang memiliki potensi-potensi kecerdasan dan bakat istimewa, diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus.”

Wujud dari adanya aturan tersebut adalah mulai diterapkannya sistem pendidikan inklusif. Peraturan tersebut juga praktis mengubah paradigma pendidikan

Indonesia yang tadinya terpisah mulai berangsur-angsur inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya inovasi dan strategi untuk mendekatkan dan memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, secara lebih mendasar, pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai suatu produk reformasi dalam lingkup pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, serta perluasan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Meskipun begitu, jumlah sekolah inklusif di Indonesia menurut data pokok pendidikan tahun 2019 berjumlah 29.317 sekolah. Di Jawa Tengah sendiri sekolah inklusif baru berjumlah 519 sekolah yang terdiri atas 472 sekolah berstatus negeri dan sekolah berstatus swasta berjumlah 47 sekolah. Kabupaten Boyolali sendiri yang dijadikan lokus penelitian menurut data terakhir yakni tahun 2012 memiliki 80 sekolah inklusif dan SMPN 4 Mojosongo Boyolali Boyolali adalah satu diantaranya. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif di Boyolali sendiri pemerintah kabupaten bahkan membuat payung khusus dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali No 54/2012 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Terbitnya perbup tersebut praktis

mengakomodasi pertumbuhan jumlah sekolah penyelenggara inklusif yang tadinya hanya 36 sekolah pada 2005 menjadi 80 pada 2012 (Ryantie, 2013). Untuk bahan analisis, nantinya yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa sebagai pengganti Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali No 54/2012 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang tidak dapat ditemukan dokumennya.

Perkembangan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang signifikan di Kabupaten Boyolali menarik penulis untuk melihat bagaimana kualitas pendidikan inklusif yang telah diselenggarakan dalam lingkup manajemen publik. Penulis sendiri akan melihat tiga permasalahan utama yang sering terjadi dalam pendidikan inklusif, yakni: kurikulum, ketersediaan guru pembimbing khusus, dan sarana dan prasarana yang nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen tersebut, penulis akan

memfokuskan melakukan penelitian tiga aspek utama dalam manajemen pendidikan inklusif, yakni kurikulum, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana.

Kurikulum menurut Ilahi (2013:167) merupakan faktor penentu saat merencanakan manajemen pendidikan inklusif. Arah dan tujuan pendidikan tidak bisa tercapai tanpa disusunnya suatu kurikulum. Penyediaan fasilitas siswa berkebutuhan khusus yang digabungkan dengan siswa biasa tidak bisa dipungkiri lagi sekolah inklusif memerlukan kurikulum khusus dalam menjalankan pendidikan inklusif. Kurikulum pendidikan inklusif yang disusun tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan kurikulum sekolah reguler, hanya saja kurikulum yang berada di sekolah inklusif harus dilakukan improvisasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Improvisasi dilakukan bertujuan supaya penggunaan kurikulum di sekolah inklusif tersebut sesuai dapat dilakukan langkah pemilahan. Pertama, anak dengan kemampuan akademik yang homogen disiapkan menggunakan kurikulum terpadu maupun kurikulum normal. Kedua, apabila terdapat anak yang memiliki kemampuan sedang diberikan kurikulum fungsional/vokasional. Ketiga, anak dengan kemampuan rendah disiapkan kurikulum

bina diri. Diluar pemilahan tersebut, perlu juga disiapkan kurikulum khusus untuk setiap ABK sebelum memulai kegiatan akademik. Sekolah juga perlu mempersiapkan regulasi teknis pembelajaran untuk memudahkan proses belajar mengajar seperti sistem evaluasi, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) (Kustawan, 2013: 95).

Adanya siswa berkebutuhan khusus di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali Boyolali mendorong sekolah untuk memenuhi kebutuhan penyusunan kurikulum khusus diluar kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus yang belajar di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali Boyolali sendiri hanya ada siswa dengan kecacatan kesulitan belajar (*slow learner*). Dengan adanya siswa berkebutuhan khusus yang kesulitan belajar tersebut SMPN 4 Mojosoongo Boyolali Boyolali seharusnya tidak ada kesulitan dalam membuat kurikulum khusus. Faktanya, penulis melihat kurikulum khusus yang seharusnya dibuat justru sama sekali tidak disusun. Dengan tidak adanya kurikulum khusus praktis akan berdampak pada siswa berkebutuhan khusus.

Komponen berikutnya yang akan diteliti dilihat dari tenaga pendidik dalam hal ini guru. Dalam sekolah inklusif guru

pembimbing khusus (GPK) merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Guru pembimbing khusus menurut Kustawan (2013: 129) merupakan guru yang memiliki kualifikasi akademik yang berasal dari program studi tertentu guna memberikan bimbingan kepada guru di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kualifikasi khusus guru pembimbing khusus yang dibutuhkan memiliki tugas antara lain: (1) membuat program pembimbingan bagi guru secara umum; (2) melakukan monitoring dan evaluasi pembimbingan guru lain; (3) memberikan layanan berupa intervensi dan advokasi kepada peserta didik; dan (4) memberikan bantuan baik dalam pengembangan kurikulum, media pembelajaran, dan sarana prasarana.

Pada faktanya, penulis melihat guru pembimbing khusus yang sejatinya sangat penting tersebut tidak terdapat dalam sekolah inklusif. Padahal guru pembimbing khusus merupakan pilar dalam penyelenggaraan sekolah inklusif dan memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan, dan keterampilan dalam memahami siswa ABK. Dengan tidak adanya guru pembimbing khusus praktis terdapat kekosongan dalam posisi tersebut. Dengan melimpahkan seluruh tugas kepada guru selain guru pembimbing khusus akan memberikan dampak tidak berjalannya

sistem pendidikan inklusif dalam sekolah tersebut.

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sarana dan prasarana fisik harus dibedakan dengan PDBK agar lebih mudah dalam mengakses sarana dan prasarana yang disediakan sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang “Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB, sekolah perlu memperhatikan aksesibilitas non fisik dan aksesibilitas fisik” (Kustawan, 2013: 137).

Aksesibilitas non fisik, dapat berupa aturan atau prosedur, harus disediakan untuk memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus berpartisipasi penuh dalam kegiatan pendidikan atau sekolah, adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan layanan administrasi. Jenis pelayanan dari aksesibilitas ini dapat berupa: suara, bunyi, dan tulisan yang melekat dengan aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik dapat dikatakan sebagai fasilitas yang memudahkan setiap orang agar dapat masuk ataupun keluar pada suatu fasilitas seperti bangunan atau area tersebut. Standar ukuran aksesibilitas fisik minimal 160 cm untuk setiap fasilitas fisik

sekolah seperti jalan, koridor sekolah dan kelas.

Sayangnya, di lapangan sekolah tidak menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memudahkan PDBK. Bahkan media pembelajaran untuk PDBK pun tidak disediakan. Artinya, sarana dan prasarana untuk siswa ABK atau PDBK masih terabaikan. Hal tersebut tergambar dalam foto yang penulis lampirkan dibawah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan program penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dari orang dan perilaku dalam bahasa tertulis atau lisan, dan dapat menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk observasi.

Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang objek observasi atau keadaan objek observasi tersebut. Ini mencoba untuk mendeskripsikan, merekam, menganalisa dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penelitian tidak menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan informasi sesuai dengan variabel yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan metode lain berupa studi kasus. Sesuai dengan uraian Robert K Yin (2010: 1-15), studi kasus digunakan merinci dan menelaah secara mendalam tentang seseorang, kelompok, sebuah program, atau suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah SMPN 4 Mojosongo Boyolali. Sekolah ini ditetapkan sebagai sekolah inklusif pada tahun 2010. Adapun informan yang dipilih adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, dan Guru Mata Pelajaran Olahraga.

Data penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan penerapan pendidikan inklusif mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Untuk melihat penerapan peraturan tersebut dari perspektif manajemen

publik, perlu melihat fenomena berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Kurikulum yang digunakan oleh SMPN 4 Mojosongo Boyolali tidak dilakukan modifikasi untuk siswa berkebutuhan khusus yang belajar disana seperti teori yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Ilahi (2013: 171). Bahkan, kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum reguler. Perbedaannya adalah siswa berkebutuhan khusus dikumpulkan kembali untuk melaksanakan belajar tambahan. Kemudian, seperti yang telah dijelaskan pada bab tiga, kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan belajar-mengajar yang digunakan adalah kurikulum reguler. Implementasi kurikulum reguler untuk kelas inklusif tersebut jelas tidak sesuai teori dari Tomlinson (dalam Andini et al., 2020: 34) yang mengarahkan penerapan kurikulum agar tercipta kelas dengan siswa beragam dan diferensiasi pengajaran.

Keadaan tersebut sedikitnya menunjukkan dua faktor yang menyebabkan kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus tidak dilakukan

modifikasi. Pertama, guru-guru secara khusus tidak memiliki wawasan yang mumpuni untuk melakukan modifikasi terhadap kurikulum seperti yang seharusnya sesuai penjelasan dari Ilahi (2013: 171). Kedua, penulis juga menemukan fakta bahwa saat ini siswa berkebutuhan khusus yang belajar di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali tidak memiliki kecacatan yang berat. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan.

Bahan ajar dilakukan modifikasi secara terbatas. Modifikasi yang dilakukan secara substansial melihat pengembangan aspek akademik dan berorientasi pada kebutuhan sekolah tidak dilaksanakan seperti teori yang telah dijelaskan sebelumnya (Ilahi, 2013: 172-173; Kustawan, 2013: 103). Modifikasi bahan ajar juga tidak dilakukan dengan melakukan assesmen atau penilaian akademik setiap siswa sesuai *inclusive grading model* yang dikemukakan oleh Jung dan Guskey (dalam Andini et al., 2020: 36). Oleh karena itu, bahan ajar yang digunakan di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali dapat dikatakan belum sepenuhnya dilakukan modifikasi karena hanya terbatas di beberapa mata pelajaran saja. Selain itu, bahan ajar yang

dimodifikasi tidak memperhatikan prinsip pengembangan akademik yang seharusnya diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus.

Fasilitas yang dimiliki oleh SMPN 4 Mojosoongo Boyolali dari awal ditetapkan menjadi sekolah inklusif hingga saat ini belum memenuhi standar sesuai penjelasan Kustawan (2013: 137-147) bahwa sekolah perlu memenuhi aksesibilitas fisik dan non fisik yang memudahkan bagi siswa. Oleh karena itu, penulis melihat sekolah sengaja tidak menyediakan sarana dan prasarana khusus sesuai standar dengan alasan siswa berkebutuhan khusus di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali kasusnya hanya lambat belajar.

2. Pengorganisasian

Laporan pertanggungjawaban disusun oleh SMPN 4 Mojosoongo Boyolali satu tahun sekali. Lapornya sendiri tidak pernah menyentuh bahasan khusus tentang pendidikan inklusif yang dijalankan oleh sekolah sesuai yang dijelaskan Kustawan (2013: 56). Selain itu, fakta lain yang penulis temukan adalah untuk masalah keuangan sendiri sekolah saat ini tidak pernah diberi anggaran

khusus untuk menjalankan pendidikan inklusif.

Secara substansi, terdapat dua bentuk pelatihan, yakni pelatihan berupa pembuatan RPP. Narasumber pertama mengatakan pelatihan yang oleh narasumber pertama disebut penataran pernah diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, namun materi yang disampaikan hanya membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Fakta yang penulis temukan materi yang disampaikan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Kustawan (2013: 121) karena tidak ada perbedaan dalam hal substansi antara jenjang SD maupun SMP.

Kurangnya substansi yang didapatkan dari pelatihan tersebut dapat menyebabkan keluaran yang dihasilkan dari pelatihan tersebut tidak optimal, sehingga pelatihan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif.

Guru pembimbing khusus di SMPN 4 Mojosongo Boyolali tidak ada sama sekali. Padahal, sekolah inklusif harusnya memiliki guru pembimbing khusus seperti yang telah dijelaskan Kustawan (2013: 124). Dengan tidak adanya guru

pembimbing khusus tersebut memiliki dampak yang paling mudah dirasakan adalah proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus tidak bisa ditangani secara maksimal.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pedoman tenaga kependidikan tahun 2017 (dalam Zakia, 2015: 115) perlu dibuka proses perekrutan guru pembimbing khusus melalui tiga cara: pertama, merekrut guru dari SLB terdekat: kedua, melakukan perekrutan bagi yang memenuhi kualifikasi PLB dan guru reguler yang telah memperoleh pelatihan tentang ABK dan ketiga, dari perekrutan dari klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak. Tetapi, SMPN 4 Mojosongo Boyolali tidak merekrut guru untuk dijadikan guru pembimbing khusus melalui cara-cara tersebut.

Kerjasama yang telah dijalin oleh SMPN 4 Mojosongo Boyolali. Kerjasama yang sudah terjalin saat ini dengan perguruan tinggi yakni Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan Sekolah Luar Biasa. Bentuk kerjasama tersebut antara dengan UNS hingga hari ini hanya berbentuk PKH, namun kerjasama dengan SLB sudah terjalin

hingga pemberian konsultasi apabila ada masalah berat yang terjadi di sekolah. Sayangnya, kerjasama dengan masyarakat hingga saat ini belum terjalin.

Berdasarkan penjelasan dari Kustawan (2013: 154-155) SMPN 4 Mojosoongo Boyolali belum menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan masyarakat sekitar sekolah. Kedepannya diharapkan adanya kerjasama antara SMPN 4 Mojosoongo Boyolali dengan dua entitas tersebut agar operasional sekolah inklusif dapat lebih mudah berjalan dan sekolah inklusif lebih dikenal luas di masyarakat.

3. Pelaksanaan

Proses pembelajaran di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali tidak dilakukan penyesuaian. Alasan kenapa tidak ada penyesuaian proses pembelajaran karena siswa berkebutuhan khusus disana menurut narasumber hanya lambat belajar seperti penjelasan terkait tidak adanya modifikasi bahan ajar yang telah dijelaskan sebelumnya.

Padahal sebagaimana dijelaskan Kustawan (2013: 134) kondisi siswa berkebutuhan khusus dalam sekolah harus tetap diberikan fasilitas berupa proses pembelajaran yang sesuai dengan

kemampuannya. Fasilitas tersebut dapat terwujud dalam beberapa bentuk. Pertama, penggunaan media tertentu sembari menjelaskan konsep; kedua, pemaparan materi yang disederhanakan; ketiga, penekanan pada peningkatan kemampuan yang dibutuhkan setelah lulus sekolah; dan keempat, pemberian penugasan yang lebih mudah.

SMPN 4 Mojosoongo Boyolali dalam melakukan penilaian hanya menemukan satu bentuk penyesuaian dari tiga bentuk penyesuaian yang dijelaskan sebelumnya. Penyesuaian dilakukan dalam cara penilaian. Terdapat dua bentuk modifikasi, yakni membebaskan siswa berkebutuhan khusus dari ujian nasional dan menurunkan nilai KKM lebih rendah dari siswa biasa. Khusus untuk siswa berkebutuhan khusus dibebaskan untuk tidak mengikuti ujian nasional. Meskipun begitu, ujian sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus tetap diwajibkan. Fakta lain menyebutkan meskipun dibebaskan dari ujian nasional, orang tua siswa masih ada yang memaksakan anaknya untuk mengikuti ujian nasional. Sementara dalam proses penilaian, angka nilai KKM diturunkan dari nilai standar. Seperti nilai KKM yang seharusnya 65

untuk satu mata pelajaran diturunkan menjadi 55.

Menyadari bahwa setiap siswa dalam sekolah memiliki keunikan masing-masing, seharusnya sekolah juga melakukan dua bentuk penyesuaian yang lain. Seperti dalam penyesuaian waktu seharusnya siswa berkebutuhan khusus diberikan kelonggaran waktu dalam mengerjakan baik ujian kenaikan kelas, ujian sekolah, maupun ujian nasional. Selain itu, diperlukan juga bentuk penyesuaian materi dengan menurunkan kesulitan materi dengan siswa bukan berkebutuhan khusus dengan cara menggunakan media khusus maupun diberikan penjelasan yang lebih sederhana.

4. Evaluasi

Evaluasi di SMPN 4 Mojosongo Boyolali tidak pernah dilakukan sama sekali. Meskipun belum pernah melaksanakan evaluasi sekalipun namun hingga saat ini tidak ditemukan kendala yang berarti terutama dari kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Padahal evaluasi perlu dilaksanakan secara rutin karena menurut Brinkerhoff (dalam Widoyoko, 2009: 4) proses evaluasi ini yang akan

menjadi tolak ukur ketercapaian pendidikan inklusif tersebut.

Monitoring yang dilakukan diadakan secara kolektif oleh sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif se-Kabupaten Boyolali dengan mengadakan kumpul secara rutin antara 2-3 bulan sekali. Narasumber sendiri mengakui sebenarnya kegiatan tersebut hanya berbentuk pertemuan. Namun, selama pandemi covid-19 pertemuan tersebut belum pernah dilaksanakan. Padahal bentuk monitoring yang dilakukan tersebut jelas tidak sesuai dengan tesis yang disampaikan oleh Kustawan (2013: 152). Bentuk monitoring tersebut oleh penulis dianggap tidak sesuai serta tidak layak karena tiga alasan. Pertama, sekolah yang berkumpul menurut narasumber hanya sekedar berkumpul tanpa ada proses selanjutnya; kedua, kumpul tersebut intensitasnya kurang; ketiga, tidak ada suatu laporan apapun yang dianalisis dari kumpul tersebut.

Laporan kegiatan sekolah dilaksanakan dalam forum komunikasi guru-guru sekolah inklusif. Itupun yang dilaporkan hanya sebatas data siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, penyusunan laporannya disusun dalam

forum tersebut. Namun laporan tersebut masih kurang laporan keuangan karena sekolah tidak pernah menyusun laporan keuangan.

Seharusnya sekolah dapat membuat laporan pertanggungjawaban secara teratur terutama laporan keuangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Stab dan Peck (dalam Kristiawati, 2016: 6) sekolah seharusnya dapat menyusun laporan keuangan secara khusus meski pembiayaan dari pemerintah terbilang minim. Laporan tersebut menurut Sulistyorini (2006: 216) memiliki fungsi agar penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, bertujuan untuk meminimalkan kesalahan penggunaan dana sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

KESIMPULAN

a. Perencanaan Pendidikan Inklusif

1. Kurikulum yang digunakan oleh SMPN 4 Mojosongo Boyolali tidak dilakukan modifikasi untuk siswa berkebutuhan khusus. Kurikulum yang digunakan untuk siswa berkebutuhan khusus masih menggunakan kurikulum reguler.
2. Bahan ajar secara umum tidak ada modifikasi. Namun terdapat modifikasi

bahan ajar hanya terdapat dalam lima mata pelajaran utama, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Olahraga. Bahan ajar dilaksanakan dengan cara siswa berkebutuhan khusus dua kali belajar dalam satu hari, yakni pagi dengan siswa umum dan siang siswa berkebutuhan khusus dikumpulkan dalam satu kelas.

3. Sekolah tidak menyediakan sarana sesuai standar, khususnya yang diperuntukkan untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut terjadi karena siswa berkebutuhan khusus yang belajar di SMPN 4 Mojosongo Boyolali kasusnya hanya lambat belajar.

b. Pengorganisasian Pendidikan Inklusif

1. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh SMPN 4 Mojosongo Boyolali satu tahun sekali. Lapornya sendiri tidak pernah menyentuh bahasan khusus tentang pendidikan inklusif yang dijalankan oleh sekolah. Fakta lain ditemukan berupa masalah keuangan sekolah saat ini tidak pernah diberi anggaran khusus untuk menjalankan pendidikan inklusif.

2. Pelatihan dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni pertama dalam pembuatan RPP dan kedua dalam bentuk workshop. Masalah yang timbul adalah dalam pelatihan yang pertama tidak pernah ada tindak lanjutnya sementara pelatihan kedua materi semua jenjang pendidikan disamakan.
3. Sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus. Penyebab utama tidak adanya guru pembimbing khusus tersebut karena sekolah tidak memiliki kurikulum khusus.
4. Kerjasama sudah terjalin baik dengan pemerintah maupun perguruan tinggi dan SLB. Namun belum ada kerjasama secara khusus dengan masyarakat. Kerjasama dengan pemerintah kurang optimal karena pemerintah belum memberikan perhatian yang maksimal. Sedangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan SLB sudah terjalin dengan optimal.

c. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

1. Sekolah tidak melakukan penyesuaian proses pembelajaran karena siswa berkebutuhan khusus di SMPN 4 Mojosongo Boyolali bukan

merupakan kasus kecacatan yang berat.

2. SMPN 4 Mojosongo Boyolali memberikan dua bentuk penyesuaian proses penilaian, pertama dibebaskan dari mengikuti ujian nasional dan kedua menurunkan nilai KKM lebih rendah dari siswa biasa.

d. Evaluasi Pendidikan Inklusif

1. Kegiatan evaluasi di SMPN 4 Mojosongo Boyolali tidak pernah dilakukan sama sekali. Dengan penjelasannya hingga saat ini tidak pernah ditemukan kendala yang berarti terutama dari kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
2. Monitoring dilakukan secara kolektif oleh sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif se-Kabupaten Boyolali dengan mengadakan kumpul secara rutin antara 2-3 bulan sekali.
3. Kegiatan pelaporan dilakukan dalam forum komunikasi guru-guru sekolah inklusif. Itupun yang dilaporkan hanya sebatas data siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, penyusunan laporannya disusun dalam forum tersebut.

SARAN

1. Perencanaan Pendidikan Inklusif

- a. Penulis memberikan saran agar dibuatkan kurikulum khusus meskipun kecacatan siswa berkebutuhan khusus disana dianggap ringan. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
- b. Modifikasi yang telah dilakukan pada mata pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya diharapkan dapat ditingkatkan lagi agar siswa berkebutuhan khusus setidaknya dapat memahami materi pokok yang ada pada mata pelajaran tersebut.
- c. Penulis menyarankan sekolah agar menyediakan sarana prasarana yang sesuai standar seberat apapun kecacatan siswa berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan bagi seluruh siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus.

2. Pengorganisasian Pendidikan Inklusif

- a. Penulis memberi saran selanjutnya pertanggungjawaban dibuat sangat spesifik khususnya kondisi SMPN 4 Mojosongo Boyolali selaku sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan keuangan yang layak untuk operasional sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

- b. Pelatihan yang sudah pernah dijalankan diharapkan ada tindak lanjutnya agar program pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal. Selain itu, pelatihan yang diadakan seharusnya diberikan klaster sesuai jenjang pendidikan yang ada.
- c. Kekurangan GPK sudah terjadi di banyak kasus. Sekolah diharapkan dapat menjalin kerjasama lebih erat dengan SLB guna memenuhi kekurangan GPK tersebut.
- d. Pemerintah diharapkan dapat membangun kerjasama yang lebih intensif dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif selaku pembina sekolah penyelenggara. Berkaitan dengan saran sebelumnya, sekolah bisa meningkatkan kerjasama baik dengan perguruan tinggi hingga SLB untuk penyediaan tenaga tambahan sebagai GPK. Selain itu, sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan masyarakat khususnya dalam ranah sosialisasi dan promosi pendidikan inklusif.

3. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

- a. Penulis menyarankan dapat melakukan penyesuaian terhadap proses pembelajaran. Baik itu dibantu dengan Guru Pembimbing Khusus maupun penyediaan media pembelajaran yang akan memudahkan siswa berkebutuhan khusus.
- b. Penyesuaian proses penilaian yang telah dilaksanakan diharapkan dapat ditingkatkan lagi. Hal ini berguna bagi kemudahan siswa berkebutuhan khusus dalam ujian akhir maupun penyetaraan nilai yang akan dikeluarkan sekolah.

4. Evaluasi Pendidikan Inklusif

- a. Penulis memberikan saran sekolah melakukan evaluasi meskipun siswa berkebutuhan khusus yang belajar di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali hanya lambat belajar.
- b. Selain dilaksanakan monitoring secara kolektif, penulis menyarankan agar sekolah menyusun monitoring secara mandiri agar lebih mudah terlihat apa yang perlu diperbaiki dalam keberjalanan pendidikan inklusif di SMPN 4 Mojosoongo Boyolali.
- c. Penulis menyarankan kepala sekolah dapat lebih aktif menyusun laporan yang berisi keadaan secara khusus keberjalanan pendidikan inklusif agar

lebih mudah untuk melakukan pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Press.
- Andini, D. W., Rahayu, A., Budiningsih, A., & Mumpuniarti. (2020). *Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Kanisius.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Gava Media.
- Kristiawati, W. dan R. (2016). *Gambaran Sekolah Inklusif: Tinjauan Sekolah Menengah Pertama [The overview of inclusive school in Indonesia: Reviews of Junior High School]*. *Gambaran Sekolah Inklusif Di Indonesia Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*.
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Luxima.

- Kustawan, D. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif: Kiat Sukses Mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum dan Kejuruan*. Luxima.
- Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM Press.
- Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. BPFE UGM.
- Moleong, L. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A. (2018). *Dasar-dasar Manajemen Publik*. Intrans Publishing.
- Ryanthie, S. (2013). *Pendidikan Inklusi : Boyolali Miliki Perbup 54/2012 Sebagai Payung Hukum Pendidikan Inklusi*. Www.Solopos.Com.
<https://www.solopos.com/pendidikan-inklusi-boyolali-miliki-perbup-542012-sebagai-payung-hukum-pendidikan-inklusi-392349>
- Sari Rudiwati. (2018). Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusif Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus Melalui Pembelajaran Kolaboratif. *Jurnal FIP Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). *Metode dan Proses Penelitian*. Pustaka LP3ES.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Mandar Maju.
- Sulistiyorini. (2006). *Manajemen Pendidikan Islam*. Elkaf.
- Syafiie, I. K. (2006a). *Ilmu Administrasi Publik* (2006th ed.). Rineka Cipta.
- Syafiie, I. K. (2006b). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Usman, H. (2008). *Manajemen Teori dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Wahyuno, E., Ruminati, & Sutrisno. (2014). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Universitas Negeri Malang Tahun 23, Nomor 1, Mei 2014*.
- Widoyoko, E. P. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Pustaka Pelajar.
- Yin, R. (2010). *Desain dan Metode*. Rajawali Press.
- Zakia, D. L. (2015). *Guru Pembimbing*

Khusus (GPK): Pilar Pendidikan
Inklusi. *Prosiding Seminar Nasional*

Pendidikan.

